



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0067968.AH.01.07.TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN KELOMPOK TANI SRI MENTES SATU DESA PRAYUNGAN**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ELVI HANDAYANI, SH., M.KN , sesuai salinan Akta Nomor 130 Tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat oleh ELVI HANDAYANI, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KELOMPOK TANI SRI MENTES SATU DESA PRAYUNGAN tanggal 16 Juli 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016071635100529 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KELOMPOK TANI SRI MENTES SATU DESA PRAYUNGAN;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
PERKUMPULAN KELOMPOK TANI SRI MENTES SATU DESA PRAYUNGAN  
Berkedudukan di KABUPATEN BOJONEGORO, sesuai salinan Akta Nomor 130  
Tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris ELVI HANDAYANI, SH., M.KN yang  
berkedudukan di KABUPATEN BOJONEGORO.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 Juli 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**

DICETAK PADA TANGGAL 20 Juli 2016



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0067968.AH.01.07.TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN KELOMPOK TANI SRI MENTES SATU DESA PRAYUNGAN

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
SUWIGNYO	3522121211590004	PENGURUS	KETUA
HARIYOTO	3522121710610002	PENGURUS	SEKRETARIS
SUROTO	3522120807580003	PENGURUS	BENDAHARA
SRI RAHAYU	3522124109780001	PENGAWAS	PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 Juli 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 20 Juli 2016